

ADVOKASI GREENPEACE DALAM MENDESAK PENGHENTIAN PENGGUNAAN BATU BARA SEBAGAI SUMBER ENERGI PEMBANGKIT LISTRIK DI INDONESIA

Ni Komang Triani Wulandari¹⁾, Ni Wayan Rainy Priadarsini²⁾, A. A. Ayu Intan Parameswari³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Email: trianiwulandari65@gmail.com¹⁾, rainypriadarsini@yahoo.com²⁾,
prameswari.intan@gmail.com³⁾

ABSTRACT

Greenpeace as an international non-governmental organization committed to the environmental protection. This study aims Greenpeace's advocacy in urging Indonesian Government to stop using coal as an energy source for electricity generation in Indonesia, in the periods of 2015 - 2017. This research used descriptive qualitative research methods by using the concept of NGOs and strategy and tactic of NGOs. Both of those concepts were able to explain the activity of Greenpeace as a advocacy NGOs in addressing environmental damage due to Indonesian Government policy. This study found that the advocacy of Greenpeace success in influencing the society of danger of coal in Indonesia.

Keyword: NGOs, Greenpeace Advocacy, Coal, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Dalam studi Hubungan Internasional, permasalahan terkait lingkungan hidup turut berkembang menjadi sebuah permasalahan global yang dialami di berbagai negara. Meningkatnya perhatian terhadap aspek lingkungan hidup sebagai salah satu permasalahan global juga meningkatkan perhatian dari para aktor-aktor Hubungan Internasional. Selain negara, aktor non-negara seperti organisasi non-pemerintah/*non-governmental organization* (NGO) turut serta dalam menangani permasalahan lingkungan hidup. NGO telah berkembang menjadi salah satu aktor yang berpengaruh dan memiliki peranan yang penting dalam dunia internasional dan mempunyai kekuatan untuk mendorong terjadi suatu perubahan (Merilainen, 2011).

Dalam Hubungan Internasional, NGO yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup memiliki peranan penting dalam menyoroti suatu permasalahan lingkungan hidup global (Pramudianto, 2008). Tujuan dari sebuah NGO lingkungan ialah untuk dapat menyelamatkan lingkungan hidup di bumi. Untuk dapat mencapai tujuannya, NGO melakukan berbagai macam cara, salah satu cara yang dilakukan NGO untuk mempengaruhi aktor lain yaitu advokasi (Spar & La Mure, 2003). Contoh NGO advokasi yang bergerak dalam menangani permasalahan lingkungan hidup global ialah Greenpeace.

Advokasi merupakan kegiatan yang dilakukan Greenpeace dalam menangani permasalahan lingkungan hidup. Advokasi menjadi pengupayaan Greenpeace untuk mengangkat isu permasalahan lingkungan

hidup agar mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Dengan melakukan advokasi, Greenpeace memiliki tujuan untuk mempengaruhi pihak-pihak lain untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Salah satu advokasi Greenpeace dalam menangani permasalahan lingkungan global adalah penolakan terhadap penggunaan sumber energi fosil seperti batu bara dalam pembangkit listrik di dunia untuk mencegah terjadinya perubahan iklim (Greenpeace, 2013).

Perubahan iklim menjadi isu permasalahan lingkungan hidup yang tengah dihadapan global. Isu perubahan iklim telah menjadi global sejak 1992 pada *Earth Summit* di Rio de Janeiro-Brazil hingga tahun 2015 pada Konferensi Paris. Indonesia turut menjadi perhatian Greenpeace dalam permasalahan lingkungan terkait perubahan iklim. Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*). Indonesia berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Namun, dalam implementasi kesepakatan tersebut, pemerintah Indonesia justru berbeda isi Kesepakatan Paris. Pemerintah Indonesia tetap menggunakan energi fosil seperti batu bara yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca.

Sebagai negara berkembang, pemerintah Indonesia sedang giat melakukan pembangunan pembangkit listrik. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan mendorong kebutuhan listrik meningkat tujuh persen per tahun. Pada tahun 2015,

pemerintah mengeluarkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yaitu pembangunan pembangkit listrik yang berskala 35.000 MegaWatt. Pemerintah Indonesia secara signifikan meningkatkan penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik dari 35 persen menjadi 70 persen (*Country Environmental Analysis*, 2016).

Penggunaan batu bara yang massif menimbulkan berbagai kerugian terhadap lingkungan maupun kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Kerugian akibat penggunaan batu bara berupa kerusakan lingkungan seperti perubahan bentang alam; penurunan kualitas udara, tanah, dan air; hingga perubahan-perubahan tatanan sosial budaya (Greenpeace, 2013). Penurunan kualitas lingkungan menyebabkan polusi hingga terjadi peningkatan emisi gas rumah kaca. Peningkatan emisi tersebut semakin mempercepat terjadi perubahan iklim dan mempengaruhi segala aspek sosial-ekonomi masyarakat.

Kerugian dari penggunaan batu bara dalam pembangkit listrik yang sudah buruk di Indonesia telah dikritik dan ditentang oleh kalangan masyarakat, khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan (Nababan dalam CNN, 2018). Namun, tentangan dan aspirasi masyarakat tidak mendapatkan respon dari pemerintah Indonesia. Sikap pemerintah yang mengabaikan hak-hak lingkungan dan aspirasi masyarakat, menjadi awal dari advokasi penolakan terhadap batu bara oleh Greenpeace di Indonesia.

Dalam melaksanakan advokasi penolakan batu bara sebagai sumber

energi pembangkit listrik di Indonesia, Greenpeace menggandeng aktor-aktor lokal. Greenpeace menggandeng LSM-LSM lokal yang bergerak dalam lingkungan hidup dan memobilisasi masyarakat yang terdampak dari pembangunan energi kotor di Indonesia. Greenpeace berusaha untuk mendesak perubahan kebijakan KEN dalam penggunaan batu bara sebagai sumber energi dalam pembangkit listrik di Indonesia dengan melibatkan aktor-aktor lokal.

Di Indonesia, Greenpeace juga berusaha memberikan solusi kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan pembangunan berkelanjutan dengan beralih menggunakan energi bersih terbarukan (EBT). Selain untuk mendesak pemerintah Indonesia, Greenpeace juga berusaha untuk menyadarkan masyarakat umum, yang mana sebagian besar masyarakat Indonesia belum memiliki kesadaran atas penggunaan energi yang tidak efisien menyebabkan kerugian terhadap lingkungan hidup (Greenpeace, 2011).

2. KAJIAN PUSTAKA

Dalam kajian pustaka, peneliti menggunakan 3 tulisan penelitian sebelumnya. Tulisan pertama yakni "Gerakan Transnasional dan Kebijakan: Strategi Advokasi Greenpeace *Detox Campaign on Fashion* di Tiongkok" oleh Puti Parameswari pada tahun 2016. Dalam kasus permasalahan isu polusi air di Tiongkok, Greenpeace memiliki tujuan utama untuk pembersihan atau penghilangan bahan-bahan kimia

berbahaya dari produksi industri tekstil di Tiongkok. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, Greenpeace melakukan strategi advokasi. Strategi advokasi merupakan salah satu cara untuk mempengaruhi kebijakan aktor-aktor lainnya dalam sebuah isu. Strategi advokasi yang dijalankan Greenpeace di Tiongkok ialah menggunakan metode kampanye yaitu *Detox Campaign on Fashion*.

Detox Campaign menargetkan pelaku bisnis yaitu industri tekstil atau *fashion* terkemuka dunia untuk berkomitmen menghilangkan bahan kimia berbahaya dari produksinya. Selain itu, melalui *Detox Campaign* tersebut Greenpeace juga menargetkan aktor negara Tiongkok untuk memperhatikan isu polusi air yang sudah sangat serius di Tiongkok. Dalam menjalankan advokasi *Detox Campaign* di Tiongkok, Greenpeace menggunakan penelitian dari peneliti ahli, lobi, serta diplomasi dalam menekan pihak pelaku bisnis dan pemerintah Tiongkok. Strategi advokasi *Detox Campaign* di Tiongkok yang dikemas dengan rangkaian kampanye mendapatkan dukungan serta perhatian publik Tiongkok. Kemudian, Greenpeace mengajak, melobi, dan menekan *brand fashion* untuk mendukung advokasi yang dijalankan Greenpeace untuk menekan aktor pemerintah Tiongkok.

Detox Campaign on Fashion di Tiongkok telah berhasil terhadap dua aktor target, yaitu pelaku bisnis (*brand fashion*) serta masyarakat Tiongkok hingga internasional. *Detox Campaign on Fashion* Greenpeace telah berhasil mengumpulkan dukungan dari masyarakat global serta

komitmen dari berbagai pelaku bisnis. Namun, hasil advokasi yang mempengaruhi target dari aktor negara yaitu Tiongkok belum terlihat.

Tulisan kedua ialah berjudul "*Public Pressure Versus Lobbying – How Do Environmental NGOs Matter Most in Climate Negotiations?*" oleh Katharina Retig tahun 2011. Retig (2011), menyatakan para NGO lingkungan memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan pada konferensi perubahan iklim. NGO dalam mempengaruhi konferensi perubahan iklim tergantung pada kapabilitas yang dimiliki seperti peran, kemampuan, dan waktu yang dimiliki oleh NGO.

NGO lingkungan dilihat sebagai sebuah kelompok kepentingan yang mana harus menggunakan strategi advokasi untuk mendapatkan kepentingannya. Retig (2011) memperlihatkan strategi yang digunakan oleh NGO advokasi ada dua yaitu *insider strategy* dan *outsider strategy*. NGO yang menggunakan *insider strategy* biasanya digunakan oleh NGO yang mengarah ke *advisory* NGO dan memiliki pengaruh yang lebih kuat di pengambilan keputusan dan berada di dalam proses negosiasi. Sedangkan *outsider strategy* lebih mempengaruhi pengambilan keputusan dari luar lingkaran pembuat keputusan atau lebih mempengaruhi ke arah publik, yang mana berada di luar proses negosiasi oleh para pengambil keputusan.

Hasil dari analisis penelitian Retig ini menunjukkan pengaruh dari NGO lingkungan terhadap hasil konferensi dengan menggunakan *lobbying* perubahan

iklim masih rendah. Hal ini disebabkan oleh delegasi negara sedikit memberikan ruang kepada para NGO. Namun, pengaruh NGO lingkungan terhadap publik dengan menggunakan *outsider strategy* cukup berhasil. Publik ikut tergerak di luar konferensi untuk mempengaruhi hasil keputusan konferensi.

Kajian ketiga penulis mengambil tulisan tentang taktik-taktik yang dijalankan oleh NGO advokasi. Tulisan ketiga ialah berjudul "*Tactics of Environmental NGOs in Influencing Public Policy in Malaysia*" oleh Rusli Mohd dan Kenny Cheh Sonn Lee pada tahun 1999. NGO memiliki berbagai macam cara-cara atau taktik untuk mempengaruhi aktor-aktor lainnya tergantung dari kekuatan NGO tersebut dan fokus target dari NGO. Rusli Mohd dan Lee (1999), memaparkan tentang taktik yang digunakan oleh tiga NGO lingkungan dalam mempengaruhi kebijakan lingkungan di Malaysia.

NGO dalam upaya untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan di Malaysia memiliki taktiknya tersendiri. NGO diklasifikasikan menggunakan 2 taktik yaitu *inside tactics* dan *outside tactics*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mohd dan Lee (1999), memperlihatkan bahwa NGO menjalankan taktik mereka secara berbeda. Namun, taktik tersebut dijalankan dengan tujuan yang sama yaitu sebagai upaya untuk memberikan tekanan terhadap para pembuat kebijakan publik di sebuah negara. Taktik-taktik yang dijalankan oleh NGO berdasarkan kemampuan serta aset yang mendukung dari kinerja sebuah NGO.

Semakin besar aset yang dimiliki oleh NGO, maka semakin banyak taktik yang dapat dijalankan oleh NGO.

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif. Penelitian dengan metode kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, tingkah laku yang dapat diamati dari sesuatu yang diteliti (Bagong dan Sutinah, 2007). Peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena jenis penelitian ini dianggap mampu membantu dalam menjawab permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang advokasi Greenpeace dalam mendesak penghentian penggunaan batu bara sebagai sumber energi pembangkit listrik di Indonesia. Dari kedua alasan di atas, dapat menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif secara deskriptif mampu memberi cara yang paling tepat dalam permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Batu Bara Sebagai Sumber Energi Pembangkit Listrik Di Indonesia

Batu bara memiliki peran yang sangat penting di Indonesia. Batu bara mempengaruhi berbagai aspek seperti ekonomi dan sosial masyarakat. Indonesia merupakan satu dari lima produsen batu bara terbesar di dunia dan pengeksport batu bara terbesar kedua di dunia (*Indonesia Investments*, 2017). Lebih dari 60 persen

listrik di Indonesia dihasilkan di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan sumber energi batu bara dan jumlah listrik dari batu bara diperkirakan akan meningkat hampir dua kali lipat pada tahun 2027 (ESDM, 2017).

Sejak tahun 1984, pembangkit listrik di Indonesia telah menggunakan bahan bakar batu bara (Almanda, 2001). Pembangkit listrik batu bara di Indonesia pertama kali dibangun di PLTU Suryalaya. Kapasitas dari PLTU batu bara di Suryalaya ialah 4 x 400 MegaWatt. Selanjutnya dari tahun ke tahun, pembangkit listrik di Indonesia sebagian besar menggunakan tenaga uap dengan sumber energi dari batu bara.

Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia mengeluarkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) untuk menambah daya listrik dengan melakukan pembangunan pembangkit listrik. Melalui KEN, pemerintah membuat proyek pembangunan pembangkit listrik yang memiliki skala 35.000 MegaWatt. Kebijakan ini telah dikukuhkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015-2019. Pembangunan proyek KEN 35.000 MegaWatt, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan kemandirian energi di Indonesia.

Dalam proyek KEN 35.000 MegaWatt, sebagian besar pemerintah mengalokasikan pembangunan ke dalam bentuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Dengan membangun PLTU, sumber energi dalam pembangkit listrik di Indonesia adalah menggunakan batu bara. Hampir 60% sumber energi dalam

megaprojek pembangkit listrik di Indonesia menggunakan batu bara. Hal ini membuat terjadinya peningkatan penggunaan batu bara sebagai sumber energi di Indonesia.

Data dari *Indonesia Energy Outlook* (IEO) memperlihatkan bahwa Indonesia akan masih mengandalkan batu bara sebagai sumber energi pembangkit listrik di Indonesia. Data IEO semakin diperjelas oleh pernyataan dari Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar dalam CNN Indonesia (2018) menyatakan bahwa batu bara masih akan menjadi sumber energi utama untuk pembangkit listrik di Indonesia. Pemerintah Indonesia meningkatkan penggunaan batu bara sebagai sumber energi pembangkit listrik dari 35 persen menjadi 70 persen di tahun 2020 (*The World Bank*, 2016). Hingga tahun 2050, batu bara akan tetap menjadi sumber energi utama dalam pembangkit listrik di Indonesia (*Indonesia Energy Outlook*, 2017).

Permasalahan Penggunaan Batu Bara Sebagai Sumber Energi Pembangkit Listrik Di Indonesia

Namun, penggunaan batu bara sebagai sumber energi pembangkit listrik memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, batu bara sebagai sumber energi yang pembangkit listrik dengan biaya yang paling murah dibandingkan dengan sumber energi lainnya. Sedangkan, di satu sisi lainnya, batu bara merupakan sumber energi yang paling mencemari lingkungan dan sumber utama pencemaran terhadap atmosfer bumi (Akhadi, 2000). Pemilihan sumber energi

dengan menggunakan batu bara telah menimbulkan banyak kerugian. Kerugian yang ditimbulkan baik berupa kerusakan lingkungan hingga sosial-ekonomi masyarakat. Masyarakat yang paling terkena imbas dari sumber energi ini ialah masyarakat yang berada di wilayah dekat pembangkit listrik.

Penggunaan batu bara yang sudah massif di Indonesia telah menimbulkan berbagai kerugian lingkungan. Kerugian lingkungan yang ditimbulkan seperti polusi udara, air dan mempercepat terjadinya perubahan iklim. Pembakaran batu bara melalui pembangkit listrik telah terbukti berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan manusia.

Dalam *panel Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), PLTU yang bersumber energi batu bara menimbulkan pemanasan global atau lebih dikenal dengan perubahan iklim. Pembakaran batu bara akan menghasilkan karbon dioksida (CO₂). Karbon dioksida menjadi salah satu jenis emisi gas rumah kaca, yang mana merupakan kontributor utama terhadap perubahan iklim (Tietenberg & Lewis, 2011).

Emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh emisi karbon (CO₂), dapat mengancam terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Ancaman ini memiliki efek negatif terhadap lingkungan kehidupan manusia dan membahayakan kesehatan manusia serta mempercepat kematian dini. Perubahan iklim berdampak pada penipisan lapisan atmosfer dan meningkatkan suhu di bumi, berdampak pada meningkatnya ketinggian permukaan

air laut karena terjadinya ekspansi laut, mencairnya gletser, hingga mempercepat terjadinya proses pencairan es di kutub utara maupun di kutub selatan.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk menghambat terjadinya perubahan iklim dengan berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca dan membatasi kenaikan temperatur global dibawah 2⁰C (Imelda & Fabby Tumiwa, 2016). Namun, metode pembangkit listrik yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dengan tetap melanjutkan KEN berskala 35.000 yang menggunakan sumber energi batu bara bertentangan dengan komitmen nasional dan internasional tersebut.

Kebijakan Energi Nasional (KEN) berskala 35.000 MegaWatt di Indonesia mengakibatkan semakin besar emisi yang akan dikeluarkan oleh Indonesia. Pembangunan pembangkit listrik dengan menggunakan sumber energi dari batu bara menyebabkan peningkatan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia. Dalam skala global, Indonesia menyumbang 1 (satu) persen emisi karbon dunia (*International Energy Agency* dalam Gapki, 2017). Walaupun hanya satu persen, Indonesia menempati peringkat 6 (enam) sebagai penyumbang emisi gas global (berdasarkan jumlah penggunaan bahan bakar fosil dan pembakaran hutan). Dilihat dari data serial tahunan yang dipublikasikan oleh Kementerian ESDM, mulai dari tahun 2000 sampai 2015 terjadi peningkatan GRK akibat dari pembangkit listrik di Indonesia.

Menurut laporan *World Bank*, konsumsi energi listrik di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, terjadi peningkatan ini tidak sebanding pula dengan pemberdayaan lingkungan oleh pemerintah Indonesia. KEN Indonesia yang masih menggunakan batu bara sebagai sumber energi dalam pembangkit listrik akan meningkatkan emisi GRK dan menimbulkan banyak permasalahan terhadap lingkungan. Peningkatan ini juga memperburuk kualitas lingkungan hidup di Indonesia maupun global (*The World Bank*, 2013).

Greenpeace Sebagai Lembaga Advokasi Isu Lingkungan Di Indonesia

Akibat dari penggunaan batu bara yang sudah massif di Indonesia, Greenpeace akhirnya melakukan advokasi terkait isu perubahan iklim di Indonesia. Greenpeace menyoroti penggunaan batu bara sebagai sumber energi pembangkit listrik di Indonesia. Penggunaan batu bara yang massif di Indonesia telah menyebabkan terjadinya percepatan perubahan iklim Indonesia maupun global. Greenpeace percaya bahwa dengan langkah pengurangan emisi gas rumah kaca yang ditimbulkan dari pembakaran sumber energi batu bara yang sistematis dan radikal dapat mencegah terjadinya perubahan iklim yang merusak ekosistem bumi dan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya.

Dalam menjalankan advokasi, Greenpeace menjalin kerjasama dengan berbagai macam aktor di Indonesia. Di Indonesia, Greenpeace bergabung dengan

komunitas-komunitas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal yang mempunyai arah dan tujuan yang sama yaitu menyelamatkan lingkungan (Greenpeace, 2015). Untuk permasalahan isu tentang perubahan iklim, Greenpeace bekerjasama dengan Wahana Lingkungan Nasional (WALHI), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), dan media digital 350.org Indonesia.

Greenpeace banyak melakukan advokasi dalam bentuk kampanye serta menjalankan aktivitasnya dengan melibatkan penggunaan media. Organisasi ini juga menyebarkan penelitian oleh peneliti ahli dan melakukan mobilisasi untuk mempengaruhi aktor target. Secara politis, di Indonesia Greenpeace merupakan NGO lingkungan yang cukup disegani. Greenpeace menjadi pembawa isu lingkungan yang dapat mengadvokasi sebuah ide secara politik namun tetap netral dan independen. Selain itu, pengaruh serta peran Greenpeace terlihat dari berbagai tindakan advokasi yang dapat mempengaruhi kebijakan aktor-aktor lainnya.

Mendesak pemerintah Indonesia terkait dengan KEN 35.000 MegaWatt yang sebagian besar menggunakan sumber energi batu bara, Greenpeace berupaya untuk mempengaruhi opini publik atau masyarakat. Masyarakat merupakan aktor penting dalam mendesak pemerintah. Masyarakat Indonesia berperan penting sebagai aktor yang akan memberikan tekanan terhadap pihak pemerintah Indonesia. Pendapat masyarakat akan menjadi perhatian utama dari aktor-aktor

yang terkait di dalam proses pembangunan pembangkit listrik di Indonesia. Maka, dukungan dan partisipasi dari masyarakat terhadap isu penggunaan batu bara sebagai sumber energi pembangkit listrik di Indonesia menjadi aktor target dari advokasi Greenpeace.

Advokasi yang dilakukan oleh Greenpeace di Indonesia juga untuk menumbuhkan kesadaran dari semua pihak. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Azizah (2014), advokasi yang dilakukan oleh NGO bukan hanya untuk membuat orang hanya 'sekedar tahu' melainkan untuk membuat orang agar secara langsung mau ikut 'terlibat dan bertindak'. Dengan menggalang massa dan dukungan dari berbagai pihak, Greenpeace dalam advokasinya mempunyai tujuan untuk semua pihak baik pemerintah, pihak pendanaan, hingga masyarakat sadar dan bergerak untuk bersama-sama mencegah terjadinya ancaman perubahan iklim.

Advokasi Greenpeace Di Indonesia Dalam Mendesak Penghentian Penggunaan Batu Bara Di Indonesia

Advokasi Greenpeace di Indonesia, Greenpeace menggunakan *outsider strategy* yang dikemukakan oleh Katharina Rietig (2008). *Outsider strategy* merupakan strategi yang dijalankan oleh NGO yang memiliki pendekatan ke arah publik. Strategi ini untuk menyerap dan menghimpun kesadaran publik atas suatu isu. Strategi merupakan pola yang digunakan oleh Greenpeace untuk dapat mendesak aktor target. Strategi yang digunakan oleh Greenpeace menentukan

status posisi dari Greenpeace di dalam menjalankan advokasinya.

Berdasarkan pada posisi Greenpeace di Indonesia, penolakan Greenpeace terhadap kebijakan energi yang menggunakan sumber energi batu bara, membuat Greenpeace berada pada pihak oposisi dari pemerintah Indonesia. Dengan berada pada pihak oposisi, maka Greenpeace tidak memiliki kedekatan langsung dengan pemerintah Indonesia. Greenpeace berusaha untuk dapat mempengaruhi aktor yang berada di luar lingkaran pembuat kebijakan. Aktor-aktor luar pemerintah ini yang akan digunakan oleh Greenpeace untuk memberikan desakan terhadap pemerintah Indonesia.

Advokasi Greenpeace di Indonesia memiliki target terhadap dua pihak yaitu masyarakat dan para pemegang keputusan atas bahaya di balik penggunaan energi kotor (Greenpeace, 2013). Greenpeace percaya bahwa *power* yang dimiliki oleh masyarakat sangatlah kuat untuk mempengaruhi pihak-pihak yang terkait, sehingga dukungan dari masyarakat sangatlah penting bagi Greenpeace untuk menjalankan tindakan advokasinya. Sedangkan, keputusan paling mutlak dalam sebuah negara tetap dipegang oleh para pembuat keputusan kebijakan yaitu pemerintah sebuah negara itu sendiri.

Strategi advokasi yang dilakukan oleh Greenpeace di Indonesia terdapat tiga poin yaitu riset kajian dan data (*research*), pengorganisasian masyarakat, dan kampanye. Dalam mendukung strategi advokasinya di Indonesia, Greenpeace menjalankan taktik taktik advokasi NGO.

Taktik-taktik yang dijalankan oleh sebuah NGO ialah sebagai cara-cara yang dapat dijalankan untuk memperoleh keberhasilan dan mengurangi potensi kesalahan (Ramanath & Ebrahin, 2010). Greenpeace menggunakan *outside tactics* untuk mendapatkan dukungan dan perhatian publik sehingga dapat menekan pihak pemerintah. *Outside tactics* dijalankan agar mendukung keberhasilan advokasi yang dilakukan oleh Greenpeace di Indonesia terkait dengan penghentian penggunaan batu bara sehingga mencegah laju ancaman dari perubahan iklim global.

Dalam menjalankan taktiknya, Greenpeace menjalankan taktik *working with media*. Bekerjasama dengan media, Greenpeace membagikan hasil *research*-nya di lapangan melalui media resmi Greenpeace dan media massa *online* nasional maupun internasional.

Melalui taktik *working with media*, Greenpeace berusaha untuk membagikan informasi yang sebenarnya di lapangan dan memunculkan rasa simpati dan kesadaran masyarakat umum. Greenpeace selalu memantau perkembangan masyarakat hingga pemerintah terkait isu batu bara sebagai sumber energi pembangkit listrik di Indonesia. Dalam membagikan informasi di media massa, Greenpeace membagikannya secara berkala serta dengan laporan informasi yang sangat detail. Dengan hal itu, informasi-informasi yang disampaikan oleh Greenpeace dapat mengalir secara berkala kepada masyarakat serta pencerdasan bagi masyarakat akan ancaman terjadinya perubahan iklim dan dampak dari

penggunaan batu bara dalam pembangkit listrik bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Advokasi Greenpeace dalam pengorganisasian masyarakat, Greenpeace menjalankan taktik *grassroot lobbying*. Untuk meyakinkan LSM lokal Greenpeace menggunakan taktik *grassroot lobbying*, yaitu dengan melakukan pendekatan-pendekatan *door to door* dan mengadakan intensitas pertemuan sesering mungkin dengan LSM maupun masyarakat. Dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat, Greenpeace turut menyertakan pendapatnya yang berlandaskan pada hasil riset yang telah dilakukan Greenpeace di lapangan.

Keberhasilan Greenpeace dalam pengorganisasian masyarakat dapat terlihat dengan terbentuknya sebuah koalisi menentang penggunaan batu bara sebagai sumber energi pembangkit listrik di Indonesia. Koalisi ini terbentuk pada tahun 2016 yang diberi nama Koalisi "*Break Free From Coal*". Anggota dari *Break Free From Coal* ini terdiri dari Greenpeace, Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), 350.org Indonesia dan masyarakat yang mendukung penghentian penggunaan energi kotor di Indonesia. Terbentuknya koalisi menandakan bahwa Greenpeace menjalankan taktik *entering into coalitions*.

Pembentukan koalisi memberikan sebuah *power* yang lebih dalam memberi desakan terhadap proses advokasi Greenpeace terhadap pemerintah Indonesia. Pembangunan koalisi ini juga sebagai sarana Greenpeace untuk membangun opini terkait penolakan batu bara di tengah-tengah masyarakat. Dengan bantuan dari kalangan LSM-LSM lokal, Greenpeace melakukan sosialisasi terkait isu bahaya batu bara dan perubahan iklim untuk meningkatkan opini penolakan batu bara oleh Greenpeace tersampaikan kepada masyarakat. Pengemasan informasi yang diberikan Greenpeace kepada masyarakat dikemas dengan menampilkan tulisan-tulisan dan gambaran nyata yang terjadi di lapangan. Ini bertujuan untuk mendapatkan perhatian dan simpati dari masyarakat luas. Sehingga, penolakan akan batu bara bukan hanya dari kalangan penggiat lingkungan, namun juga meluas ke publik.

Greenpeace sebagai NGO juga melakukan mobilisasi terhadap masyarakat umum (selain anggota koalisi). Hasil dari kerjasama Greenpeace dengan LSM lokal, Greenpeace dapat menjembatani masyarakat biasa untuk melakukan pergerakan perubahan. Fokus Greenpeace tidak hanya menciptakan perubahan-perubahan kebijakan, namun juga menciptakan gerakan masyarakat secara massal yang akan beraksi bersama-sama menentang penggunaan batu bara dalam pembangkit listrik di Indonesia untuk melindungi lingkungan dari ancaman perubahan iklim (Greenpeace, 2015).

Pengorganisasian masyarakat yang dilakukan oleh Greenpeace melalui advokasi merupakan upaya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat terhadap Greenpeace. Dengan pendekatan terhadap LSM lokal hingga terbentuknya sebuah koalisi penolakan terhadap batu bara sebagai sumber energi meningkatkan kekuatan advokasi yang dilakukan oleh Greenpeace. Ini terlihat dari isu-isu terkait batu bara dan perubahan iklim menjadi semakin strategis di Indonesia. Dukungan publik yang menolak pembangunan pembangkit listrik dengan sumber energi batu bara juga terlihat dari bagaimana aksi-aksi yang turun ke jalan yang dilakukan bukan hanya dari kalangan penggiat lingkungan, namun juga dari kalangan masyarakat luas.

Advokasi Greenpeace yang terakhir ialah dengan melakukan kampanye. Kampanye merupakan salah satu dari rangkaian advokasi. Kampanye juga merupakan metode paling sering digunakan oleh NGO untuk menjalankan kegiatannya. Greenpeace sebagai NGO lingkungan memiliki fokus kegiatannya pada advokasi melalui kampanye. Secara umum, Greenpeace dikenal sebagai organisasi kampanye independen berskala global. Aksi yang dilakukan oleh Greenpeace ialah untuk mengubah perilaku agar melindungi dan melestarikan lingkungan serta memelihara perdamaian (Parameswari, 2015).

Dalam menjalankan kampanyenya, Greenpeace menggunakan kampanye dengan dua metode yaitu metode secara

langsung dan metode tidak langsung. Metode secara langsung, Greenpeace menggunakan aksi-aksi berupa protes dan demonstrasi di tempat pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi batu bara dan di depan kantor-kantor instansi pemerintahan Indonesia. Sedangkan, metode secara tidak langsung, Greenpeace memanfaatkan segala media massa baik media online maupun media cetak. Kedua metode kampanye Greenpeace ini tetap memiliki tujuan untuk mengangkat isu penolakan terhadap batu bara sebagai sumber energi pembangkit listrik di Indonesia.

Kampanye Greenpeace yang dilakukan melalui metode secara langsung dengan menjalankan taktik *protest and demonstration*. Kampanye Greenpeace dengan cara protes dan demonstrasi tetap dijalankan dengan asas konfrontasi langsung tanpa kekerasan (*direct actions non-violent*). Aksi-aksi kampanye yang dilakukan oleh Greenpeace dikemas secara kreatif dan unik. Hal tersebut dilakukan agar dapat menarik perhatian dari media massa dan masyarakat umum serta untuk mempengaruhi pemerintah Indonesia untuk merevisi kebijakannya.

Taktik *protest and demonstration* dalam menyuarakan isu penolakan batu bara Greenpeace difokuskan untuk menekan pihak pemerintah Indonesia. Aksi ini dilakukan secara berkala untuk memperlihatkan kepada pemerintah Indonesia bahwa perjuangan terhadap penolakan penggunaan batu bara bukan hanya sebuah opini. Aksi *protest and demonstration* Greenpeace didukung oleh

anggota koalisi *Break Free From Coal* serta masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan pembangkit listrik menggunakan sumber energi batu bara.

Pada bulan Mei tahun 2016, dikutip dari Berita Lingkungan (2016), Greenpeace melakukan aksi *protest and demonstration* di PLTU Cirebon. Para aktivis Greenpeace dan anggota *Break Free From Coal* akan menduduki pelabuhan yang dilalui oleh kapal pen-suplay batu bara ke wilayah PLTU Cirebon. Setelah berhasil menduduki pelabuhan dan kapal pembawa batu bara, para aktivis membentangkan spanduk yang bertuliskan "*Quit Coal*" dan "*Clean Energy, Clean Air*" di dua *crane* yang memasok batu bara. Maksud dari tulisan spanduk yang dibentangkan oleh aktivis lingkungan ialah untuk mengingatkan kembali komitmen pemerintah Indonesia yang akan menurunkan emisi GRK hingga 2⁰C dalam Kesepakatan Paris. Greenpeace mengajak pemerintah Indonesia untuk segera meninggalkan dan merevisi kebijakan energi nasional yang menggunakan batu bara untuk mewujudkan komitmen tersebut.

Pada Desember 2016, Greenpeace mendatangi kantor Kedubes Jepang di Jakarta (Saputra dalam DetikNews, 2016). Di depan kantor tersebut, Greenpeace melakukan aksi *protest and demonstration* dengan menampilkan teatrikal masyarakat petani yang lahan pertaniannya dijadikan sebagai pembangkit listrik. Aksi tersebut merupakan sebuah aksi protes dan kecaman Greenpeace terhadap sebuah bank pemerintahan Jepang yaitu *Japan Bank International Cooperation*/JBIC yang menyetujui memberikan bantuan dana

untuk pembangunan pembangkit listrik dengan sumber energi kotor di Indonesia.

Greenpeace mengancam tindakan yang dilakukan oleh JBIC, yang mana telah mencederai komitmen Jepang terhadap global untuk mencegah perubahan iklim. Bantuan dana yang diberikan oleh JBIC telah menimbulkan kerusakan terhadap tempat mata pencaharian masyarakat sebagai petani serta nelayan. Dalam aksi teatrikal pengusuran lahan pertanian warga, Greenpeace mendapatkan dukungan dari Paguyuban Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Roban (UKPWR) yang mana merupakan gabungan dari para petani yang lahannya digusur oleh pemerintah untuk pembangunan pembangkit listrik (Nugraha dalam Mongabay, 2016).

Selain menggunakan metode secara langsung (*direct action*), Greenpeace juga menggunakan aksi tidak langsung. Aksi tidak langsung, Greenpeace memanfaatkan penggunaan media *online* maupun media cetak Greenpeace untuk mempengaruhi opini masyarakat umum terkait permasalahan penggunaan batu bara sebagai pembangkit listrik di Indonesia. Saat ini media sosial memegang peranan penting untuk mempengaruhi masyarakat.

Melalui aksi tidak langsung ini, Greenpeace memanfaatkan media sosial dalam mengemas isu untuk penolakan terhadap penggunaan batu bara dalam pembangkit listrik sekreatif mungkin untuk mendapatkan perhatian dari media-media online maupun cetak nasional hingga internasional. Hal ini diharapkan untuk

menyebarkan kesadaran masyarakat umum terkait bahaya batu bara dalam pembangkit listrik sehingga ikut memotivasi mereka mendesak pemerintah untuk merevisi kebijakan energinya.

Dengan taktik *telegram campaign*, Greenpeace membuat kampanye di sosial media melalui tagar *#TolakPLTU* dan *#BreakFree*, Greenpeace mengajak masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi mendesak pemerintah Indonesia merevisi kebijakan energinya. Aksi dari setiap individu melalui media sosial merupakan hal yang terhitung dan berpengaruh dalam menjalankan advokasi. Maka, penggalangan dukungan dari masyarakat umum adalah salah satu instrumen penting untuk mengadvokasi isu perubahan iklim di Indonesia. Semakin banyak dukungan individu, maka semakin terlihat keberhasilan dari sebuah advokasi Greenpeace dalam mempengaruhi masyarakat.

Advokasi Greenpeace melalui media sosial cukup menuai banyak simpatisan. Dilihat dari sosial media resmi Greenpeace, Greenpeace banyak memperoleh dukungan dari masyarakat dunia maya. Masyarakat banyak ikut berpartisipasi untuk membagikan hasil penelitian dari Greenpeace terkait isu penggunaan batu bara dalam pembangkit listrik di Indonesia.

Dukungan dari masyarakat umum dan kalangan LSM lokal merupakan kekuatan Greenpeace sebagai sebuah NGO internasional. Berbagai lapisan masyarakat turut berpartisipasi sebagai sebuah dukungan dan dorongan untuk

Greenpeace menjalankan advokasinya. Kekuatan masyarakat mampu memberikan tekanan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan tekanan dari berbagai pihak, maka akan mampu pula mendesak aktor negara yaitu pemerintah Indonesia yang dapat mengubah peraturan regulasi dan perubahan kebijakan terkait isu perubahan iklim dalam penggunaan sumber energi.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini beragumen bahwa advokasi yang dilakukan oleh Greenpeace dalam mendesak pemerintah Indonesia menghentikan penggunaan batu bara sebagai sumber energi di Indonesia menggunakan sebuah strategi dan taktik. Strategi yang dijalankan oleh Greenpeace di Indonesia dalam permasalahan batu bara menggunakan *outsider strategy*. Penggunaan *outsider strategy* didasarkan pada kredibilitas yang dimiliki oleh Greenpeace. Greenpeace yang berada pada pihak yang menolak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia menjadi sebuah pihak opsi sehingga upaya untuk mengadvokasi melalui *insider strategy* memiliki peluang yang kecil. Maka dari itu, untuk mendesak pemerintah Indonesia, Greenpeace menggunakan kekuatan aktor yang berada pada luar lingkungan pembuat kebijakan yaitu dukungan dari masyarakat.

Untuk mendukung *outsider strategy* yang dijalankan oleh Greenpeace, maka Greenpeace menggunakan beberapa taktik. Taktik yang dijalankan oleh Greenpeace ialah *working with media*,

grassroot lobbying dan *entering into coalitions*. Dalam memberikan desakan secara langsung kepada pemerintah, Greenpeace menjalankan advokasi kampanye. Greenpeace menggunakan taktik *protest and demonstration* yang menyuarakan penolakan terhadap penggunaan batu bara sebagai sumber energi pembangkit listrik di Indonesia. Selain aksi secara langsung, Greenpeace juga menggunakan aksi tidak langsung dengan menggunakan taktik *telegram campaign*. Melalui *telegram campaign*, Greenpeace menyuarakan penolakan sumber energi batu bara melalui media-media sosial resmi Greenpeace.

Strategi dan taktik yang dijalankan Greenpeace untuk mendukung advokasi penolakan penggunaan batu bara sebagai sumber energi pembangkit listrik di Indonesia dalam rentangan tahun 2015-2017 masih belum mendapatkan respon dari pembuat keputusan yaitu pemerintah Indonesia. Namun, advokasi Greenpeace untuk memperoleh dukungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia cukup menuai keberhasilan. Hal ini dapat dilihat melalui dukungan dari LSM-LSM lokal kepada Greenpeace dan adanya dukungan dari masyarakat untuk turut serta mendesak pemerintah Indonesia untuk merevisi kebijakan energi nasional.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Country Environmental Analysis/CEA. 2016. *Policy Brief: Energi dan Perubahan Iklim*.
- Merilainen, Niina. 2011. *NGOs and Agenda Setting-Influence On Public Opinion and Decision Making*. University of Jyvaskyla. European Consortium for Political Research.
- Mohd, Rusli dan Lee. 1999. *Tactics of Environmental NGOs in Influencing Public Policy in Malaysia*. Malaysia: University Putra Malaysia
- Parameswari, Puti. 2016. *Gerakan Transnasional dan Kebijakan: Strategi Advokasi Greenpeace Detox Campaign on Fashion di Tiongkok*. Unida Gontor
- Pramudianto, Andreas. 2008. *Diplomasi Lingkungan, Teori dan Fakta*. Jakarta: UI Press.
- Retig, Katharina. 2011. *Public Pressure Versus Lobbying – How Do Environmental NGOs Matter Most in Climate Negotiations?*. UK: Grantham Institute
- Spar, Deborah L. 2003. *The Power of Activism Assessing the Impact of NGOs on Global Business Management Review; Vol. 45 Issue*. California
- The World Bank. 2014. *Bank Dunia dan Lingkungan di Indonesia*.
- Greenpeace. 2013. *Batubara Mematikan*.
- Greenpeace. 2013. *Perubahan Iklim*.
- Greenpeace. 2013. *Solusi*.
- Greenpeace. 2015. *Kita, Batu Bara, dan Polusi Udara*.
- Greenpeace Indonesia. 2017. *Polusi Udara Ancam Kesehatan Masyarakat*.

